

## Abstark

Pekerja batik merupakan unsur terpenting dalam perusahaan maupun perkembangan kultur batik akan tetapi perusahaan batik di kota pekalongan yang masih abai dengan pemenuhan hak-hak pekerja batik, mayoritas perusahaan batik hanya memperhatikan produktivitas dan profit yang diperoleh oleh mereka, negara telah memberikan perlindungan hukum berupa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pemenuhan hak-hak pekerja. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum para pekerja batik di CV. Imang Jasmine Pekalongan dan mengetahui hambatan dalam perlindungan di CV. Imang Jasmine Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dijalankan sepenuhnya karena dalam pengupahan tidak sesuai regulasi yang telah ditetapkan, pasaran harga pekerja batik di Kota Pekalongan sangat murah, perusahaan tidak berani membayar diatas harga pasar karena akan menyebabkan kesenjangan sosial dan para pekerja tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pemenuhan hak, memperketat regulasi pendirian perusahaan dan perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan agar mereka terjamin dalam bekerja.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pekerja Batik, Ketenagakerjaan.**

## *Abstract*

*Batik workers are the most important element in the company as well as the development of batik culture, but batik companies in the city of Pekalongan are still ignorant of the fulfillment of the rights of batik workers, the majority of batik companies only pay attention to productivity and the profits earned by them, the state has provided legal protection in the form of Law No. Manpower Law which regulates the fulfillment of workers' rights. The purpose of this study was to determine the legal protection of batik workers in CV. Imang Jasmine Pekalongan and knowing the barriers to protection in CV. Imang Jasmine Pekalongan according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.*

*The research method used is sociological juridical, descriptive research specifications, research data sources using primary and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis used descriptive qualitative method.*

*The results of the study show that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is not fully implemented because the wages are not in accordance with the established regulations, the market price of batik workers in Pekalongan City is very cheap, companies do not dare to pay above the market price because it will cause social inequality and the workers not registered with BPJS Employment. Therefore, the government needs to supervise companies in fulfilling their rights, tighten regulations on company establishment and companies must register their workers with BPJS Employment so that they are guaranteed to work.*

***Keywords: Legal Protection, Rights Batik Workers, Employment.***